

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Politik dan Demokrasi

##### 1. Definisi Politik

Kata politik berasal dari dua kata yang pertama *politic* (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Yang kedua dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *politicus* dan bahasa Yunani greek "*politicus*" diartikan *relating to a citizen*. Kedua kata ini berasal dari kata "*polis*" yang memiliki makna *city* atau kota.<sup>1</sup> Politik pada dasarnya ialah suatu peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Karena manusia merupakan pokok penting dari politik. Oleh karena itu, Politik mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan dan pengaruh di masyarakat. Hal ini mencakup proses pemilihan umum, pembentukan kebijakan publik, dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan negara. Jadi politik adalah proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok atau negara untuk mengatur sumber daya dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>1</sup>M. Abdulkadir B. Nambo, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik ( Suatu Telaah Dari Sistem Politik)* (Gorontalo, 2005).263

Berdasarkan definisi yang ada, ditemukan 2 inti dari definisi politik:

- a. Pandangan yang menghubungkan politik dengan keberadaan negara, yang merupakan persoalan urusan pusat dan daerah.
- b. Pandangan ini tentang kekuasaan, otoritas dan konflik.<sup>2</sup>

Birch mengemukakan empat jenis kekuatan politik. Kekuatan politik pertama, yaitu paksaan politik (*political coercion*) yang diartikan sebagai pengawasan oleh negara terhadap warga negara dengan menggunakan kekerasan sehingga warga tidak memiliki alternatif lain selain patuh. Kedua, kewenangan politik (*political authority*) yang berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki hak untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang mengikat setiap pihak yang berada di dalam yuridiksinya. Ketiga, pengaruh politik (*political influence*) yang berarti tindakan langsung dan tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, manipulasi politik (*political manipulation*) yaitu tindakan yang mempengaruhi atau membentuk pandangan, nilai serta perilaku orang atau pihak lain tanpa disadari oleh pihak lain tersebut bahwa pengaruh sedang atau sudah terjadi.<sup>3</sup>

Pengaruh politik dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:

---

<sup>2</sup>Ibid.264

<sup>3</sup>Didah Durrotun Naafisah Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013).257-258

- a. Pengaruh terhadap pendapat dan perilaku politik sebagian besar warga negara,
- b. Pengaruh terhadap perilaku kalangan pemerintahan daerah,
- c. Pengaruh dari kemampuan mencegah isu potensial untuk menjadi isu yang diperdebatkan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Definisi Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani *δημοκρατία* (*demokratia*), yang berarti kekuasaan rakyat dan untuk rakyat. Kata demokrasi juga terbentuk dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti memerintah. Demokrasi dengan demikian dapat diartikan sebagai cara kekuasaan rakyat untuk mengatur negara. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat memerintah dan akan kembali kepada rakyat.

Menurut para ahli, beberapa definisi demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Maurice Duverger menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kelompok penguasa dan kelompok penguasa adalah sama dan tidak terpisah. Artinya suatu sistem pemerintahan yang pada hakikatnya semua orang (bangsa) mempunyai hak yang sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

---

<sup>4</sup>Ibid. 258

- b. Dalam materialisme dialektika Karl Marx, doktrin politik ini kemudian melahirkan demokrasi kerakyatan. Demokrasi rakyat adalah model pemerintahan yang memusatkan kekuasaan Negara di tangan satu golongan atau satu partai penting, yaitu partai komunis (distorsi mayoritas terhadap minoritas).<sup>5</sup>
- c. Menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>6</sup>

Menurut Carter dan Herz kriteria umum demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Membatasi tindakan pemerintah untuk melindungi individu dan kelompok melalui pergantian kepemimpinan yang teratur, tertib dan damai dan sarana perwakilan rakyat yang efektif
- b. Toleransi terhadap pandangan yang berlawanan
- c. Persamaan di depan hukum<sup>7</sup> yang diwujudkan dengan tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum tanpa membedakan status politik
- d. Pemilihan yang bebas diselenggarakan dengan model perwakilan yang efektif
- e. Dihormatinya hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Hasnawi Haris, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2006).<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Ibid.<sup>8</sup>

Demokrasi diyakini sebagai mekanisme politik yang dapat mengayomi kebebasan rakyat dengan memberdayakan pemerintah untuk melindungi rakyat selama mereka menikmati kebebasannya. Ketika demokrasi terjaga, rakyat dapat menikmati kebebasannya sebagai individu yang berdaulat.<sup>8</sup> Demokrasi membutuhkan partisipasi yang aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat dilibatkan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan kepentingan rakyat.<sup>9</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi dalam mewujudkan kebaikan umum, menghasilkan dua hal penting. Pertama, tidak ada aturan pasti dalam mengambil keputusan dengan prinsip persamaan politik. Kedua, tidak terciptanya kondisi yang efektif dalam memberikan pertimbangan bagi semua warga yang pada prakteknya membutuhkan sistem pemerintahan representatif dan pada gilirannya, melanggar prinsip persamaan politik melalui pemberlakuan otonomi.<sup>10</sup>

Dari pemikiran diatas, maka pengenalan akan demokrasi mulai berkembang dikalangan masyarakat hingga sampai pada saat ini. Sebab demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia,

---

<sup>8</sup>Freedom and Development Soejatmoko, *Demokratisasi Di Indonesia, Demokrasi Dan HAM*, vol. 1 No.3 (Jakarta: The Habibie Center, 2001).43-44

<sup>9</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*.29-30

<sup>10</sup>Ibid.32

karena keduanya saling mempunyai hubungan. Manusia dalam berorganisasi atau berinteraksi tidak ada artinya tanpa adanya demokrasi yang baik. Jadi demokrasi adalah suatu problem ukuran, sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat dicapai, dan seberapa besar partisipasi rakyat dalam mengambil atau pembuatan keputusan kolektif.

### 3. Sejarah Demokrasi

Praktek demokrasi pertama kali dijumpai dalam konstitusi Yunani kuno, yaitu *stad-staat* (negara-kota) dengan hak kenegaraan yang mutlak (*Ancient Greek*). Hampir semua orang Polis dalam proses reformasi negara tidak menciptakan suasana kebebasan dan kesetaraan penuh bagi semua warga Yunani kuno pada saat itu. Hal ini masih dibuktikan dengan diskriminasi politik yang meminggirkan hak-hak perempuan dan budak, maupun anak-anak.<sup>11</sup>

Perempuan dan budak dianggap tidak memiliki hak untuk berpartisipasi secara politik dalam penyelenggaraan negara. Mereka tidak menikmati kebebasan penuh, juga tidak dianggap setara dihadapan hukum atau pemerintahan bersama. Namun, persamaan kebebasan dan hak untuk menyatakan pendapat relatif terlatih dengan baik oleh semua polis dewasa, kecuali wanita dan budak. Perempuan, budak, dan anak-

---

<sup>11</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).47

anak serta orang asing tidak memiliki hak politik dalam penyelenggaraan politik.<sup>12</sup>

Melalui gerakan hak politik perempuan dan adanya gerakan anti perbudakan yang berlangsung sepanjang sejarah mengubah bentuk politik. Bentuk politik partisipatif yang melindungi kebebasan dan kesetaraan, yang inklusif dan tidak diskriminatif, telah lahir menjadi ciri sistem modern yang lebih setara dan beradab. Itu disebut akar/pokok dari demokrasi.<sup>13</sup>

Proses Pelaksanaan dari akar demokrasi ini mengedepankan legitimasi tradisional yang didasarkan pada klaim-klaim irasional, yang seringkali berperilaku tiran dan korup. Legitimasi agama dan legitimasi aristocrat, di mana suatu kelompok atau kelas dianggap lebih unggul dari orang lain dalam kemampuan untuk memimpin atau melawan, menjadi nilai-nilai anti demokrasi.<sup>14</sup>

Kebebasan dan kesetaraan untuk semua adalah tujuan dari gerakan sosial-politik berdasarkan demokrasi. Gerakan demokrasi ini berbenturan dengan keberadaan monarki (raja) dan Teokrasi (pemerintah oleh gereja), sehingga lahirlah bentuk politik kompromi. Dengan

---

<sup>12</sup>Ibid.47

<sup>13</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, 21.

<sup>14</sup>Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*.48

demikian, membuka jalan menuju demokrasi yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk republik.<sup>15</sup>

Sejarah demokrasi juga tidak lepas dari persoalan perdebatan bentuk pemerintahan. Berdasarkan teori negara, pembahasannya berada pada perbatasan penelitian sosiologis dan hukum. Dari perspektif sosiologis yang melihat struktur negara secara keseluruhan, terdapat perdebatan tentang bentuk negara. Sedangkan dari segi hukum, melihat bangunan negara menurut strukturnya, maka perdebatannya ialah tentang bentuk atau sistem pemerintahan.<sup>16</sup>

Kondisi inilah yang menyebabkan seorang negarawan Athena bernama Pericles (31 SM) mendefinisikan demokrasi dengan menetapkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Pemerintahan populer di mana rakyat berpartisipasi secara penuh dan langsung,
- b. Kesetaraan dihadapan hukum,
- c. Pluralisme, yaitu penghormatan terhadap semua kemampuan, minat, keinginan, dan pandangan
- d. Menghargai pemisahan ruang pribadi untuk perwujudan dan ekspresi kepribadian individu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid.49

<sup>16</sup>Ibid.49

<sup>17</sup>Hasnawi Haris, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.9



Pemahaman modern muncul selama Renaisans. Saat itu, lahir ide-ide besar seperti munculnya filosof yang terkenal, termasuk ilmu tentang kekuasaan oleh Niccolo Machiavelli (1467-1527). Dalam sistem politik yang demokrasi, sejauh mana pembuat keputusan kolektif yang paling efektif dari sistem tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan teratur. Dalam sistem ini, para kandidat dengan bebas memperebutkan suara, dan hampir seluruh penduduk dewasa berhak memilih.<sup>18</sup>

Demokrasi dalam perkembangannya, tidak diidentikkan hanya sebagai sistem politik atau hanya dalam kaitannya dengan kebebasan tanpa ada pelaksanaannya. Demokrasi kini tidak hanya di ranah politik, tetapi telah berhasil masuk ke ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam proses politik penataan kehidupan bersama, demokrasi diatur secara kolektif dan disebut oleh Aristoteles A. Dahl sebagai bentuk poliarki negara.<sup>19</sup> Jadi ciri utama demokrasi kuno ini adalah bahwa semua anggota polis berpenduduk relatif kecil memerintah bersama.<sup>20</sup>

#### 4. Demokrasi dari segi Sosiologis

Sosiologi dari segi bahasa terdiri dari dua bahasa, yakni *socius* dalam bahasa Yunani yang berarti kawan dan *logos* dalam bahasa latin yang berarti pengetahuan. Jadi jika digabungkan, sosiologi berarti ilmu

---

<sup>18</sup>Ibid.8-10

<sup>19</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, 37-38.

<sup>20</sup>Hasnawi Haris, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.10

pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sosiologi pada dasarnya mempelajari hubungan perilaku manusia dalam masyarakat. Sehingga bisa dikatakan, objek kajian dalam sosiologi adalah kehidupan manusia, proses interaksinya di dalam masyarakat, serta produk dari interaksi manusia di dalam masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Karl Marx adalah tokoh sosiologi yang sudah membinahi lahirnya sosiologi politik. Demokrasi dalam bidang sosiologi terletak pada hubungan antara lembaga demokrasi politik dan nilai, dan juga sistem komunikasi politik. Menurut Karl Marx hal ini merupakan peran masa lampau, masa kini, masa depan yang merupakan:

Manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi mereka tidak membuatnya seperti yang disenanginya; mereka tidak membuatnya pada kondisi-kondisi yang dipilihnya sendiri, tetapi pada kondisi-kondisi yang dihadapi secara langsung dari masa silam. Tradisi dari semua generasi yang sudah mati berpengaruh dari masa silam. Tradisi dari semua generasi yang sudah mati berpengaruh seperti suatu mimpi buruk kepada otak yang masih hidup.<sup>22</sup>

Pandangan dialektis mengenai hubungan antara masa lampau, masa kini, masa depan tidak menyiratkan bahwa masa depan ditentukan oleh masa kini. Studi-studi historis Marx menunjukkan bahwa orang membuat pilihan-pilihan, tetapi itu terbatas. Sehingga menurut Marx demokrasi sangat penting bagi sosialisme. Demokrasi tidak hanya sebagai

---

<sup>21</sup>SVD Bernard Raho, *Sosiologi* (Yogyakarta: ledalero, 2014).

<sup>22</sup>George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019).51

syarat yang diperlukan untuk membangun sosialisme tetapi dapat mendorong masyarakat mendemokratisasi sistem politik berasal dari sumber yang sama dengan keinginan masyarakat ekonomi, bahwa semua orang memiliki kendali atas struktur dan kekuasaan yang membentuk kehidupan mereka. Marx berharap dan percaya bahwa masa depan ditentukan oleh komunisme, tetapi dia tidak percaya bahwa komunisme akan terwujud bila pekerja hanya menunggu dengan pasif. Komunisme akan datang hanya melalui pilihan dan perjuangan para pekerja.<sup>23</sup>

#### **B. Teori Arend Lijphart Tentang Mayoritarianisme**

Arend Lijphart adalah profesor emeritus ilmu politik di University of California, San Diego. Dia adalah penulis *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Country* (1999) dan banyak studi lain tentang institusi demokrasi, tata kelola masyarakat yang terpecah belah, dan sistem pemilu. Kata ini awalnya muncul di *Journal of Democracy* edisi April 2004.<sup>24</sup>

Keilmuan Lijphart selalu dicirikan oleh dua ciri penting: Pertama, dengan menggabungkan penelitian empiris dengan pembangunan teori, ia cenderung berjalan secara induktif daripada deduktif. Kedua, membangun

---

<sup>23</sup>Ibid.53

<sup>24</sup>Larry Diamond dan Marc F. Plattner, *Electoral Systems and Democracy* (Amerika Serikat: Johns Hopkins University Press, 2006).

teori karena begitu berbasis empiris. Secara signifikan mempengaruhi desain dan transformasi sistem politik yang dapat direformasi dan berubah.<sup>25</sup>

Arend Lijphart secara aktif menasihati aktor politik pemerintah dan nonpemerintah saat mereka berjuang dengan reformasi demokrasi, seringkali dalam keadaan yang merugikan. Selain itu, keterlibatan teori dan praktik yang rajin di tingkat tertinggi perencanaan dan struktur sistem politik selalu menjadi ciri khas keilmuan Lijphart. Misalnya, dimasukkannya *Democracy and Power Sharing* sebagai mitra di Afrika Selatan menggambarkan kekuatan persuasif karya Lijphart.<sup>26</sup>

Arend Lijphart dengan meyakinkan telah menunjukkan bahwa ada lebih dari satu cara untuk menciptakan demokrasi yang stabil. Seperti yang ditunjukkan oleh Bingham Powell, bahwa "Terlalu sering warga negara dan sarjana yang hanya mengetahui sistem berpikir tertentu", artinya bahwa demokrasi yang tidak stabil tidak dapat dipertahankan dengan cara lain. Karena demokrasi adalah penolakan keras terhadap dari asumsi yang mereka terima sebagai landasan berpikir karena dianggap benar. Kemudian dalam desentralisasi Afrika Selatan, Lijphart menentukan institusi optimal sebagai reformasi di Afrika Selatan, mengingat konteks kasus yang dalam dan jelas masalah dunia.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid.2

<sup>26</sup>Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance In Thirty Six Countries* (New Haven and London: Yale University Press, 1999), 5.

<sup>27</sup>Larry Diamond dan Marc F. Plattner, *Electoral Systems and Democracy*.3

Dengan melakukan itu, Lijphart juga dengan meyakinkan menyangkal salah satu argumen lama terhadap konsosiasionalisme salah satu mahasiswa pascasarjana yang berani mengatakan bahwa ketergantungan pada kerjasama elit dalam masyarakat yang terpecah menghadirkan masalah, keberadaan dan stabilitas kerja sama, secara salah.<sup>28</sup> Lijphart bereaksi terhadap pemisahan kekuasaan di Afrika Selatan untuk menekankan pentingnya penentuan nasib sendiri secara segmental dalam sistem konsosiasional, berbeda dengan definisi mereka sebelumnya.<sup>29</sup>

Dua cara untuk mencapai hal ini yang direkomendasikan untuk Afrika Selatan adalah representasi proporsional dan otonomi segmental sukarela. Penentuan nasib sendiri tidak mensyaratkan bahwa penyatuan elit segmental belaka mengarah pada kerja sama, seperti yang dilakukan oleh penentuan sebelumnya. Penentuan nasib sendiri juga mendorong munculnya elit-elit segmental yang penting dan setidaknya memiliki kepentingan fundamental dalam konsep kerjasama.<sup>30</sup>

Arend Lijphart juga membuat klasifikasi bentuk dan tampilan negara demokrasi modern berdasarkan ciri-ciri demokrasi, yang dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu partai administratif dan persatuan federal.

---

<sup>28</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, 86–88.

<sup>29</sup>Larry Diamond dan Marc F. Plattner, *Electoral Systems and Democracy*.4

<sup>30</sup>Ibid.4

Setiap dimensi mempunyai lima sifat yang berbeda.<sup>31</sup> Berikut perbedaan karakteristik antara kekuasaan dan skala partai adalah:

1. Kekuasaan
  - a. Konsentrasi kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan mayoritas partai tunggal
  - b. Sistem dua partai
  - c. Sistem ini dengan bersaing bebas konsentrasi kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan mayoritas partai tunggal
2. Skala Partai
  - a. Sedangkan distribusi kekuasaan eksekutif dalam koalisi multipartai yang luas.
  - b. Sistem multipartai.
  - c. Distribusi kekuasaan eksekutif dalam koalisi multipartai yang luas.<sup>32</sup>

Namun, lima perbedaan karakteristik dalam dimensi persatuan dan federalisme adalah sebagai berikut:

- a. Persatuan dan pemerintahan terpusat vs federalisme dan pemerintahan desentralisasi

---

<sup>31</sup>Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance In Thirty Six Countries*, 5.

<sup>32</sup>Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance In Thirty Six Countries*.3

- b. Sentralisasi kekuasaan legislatif dalam parlemen unikameral vs pembagian kekuasaan legislatif antara dua badan republik yang berbeda
- c. Konstitusi fleksibel yang dapat diubah oleh mayoritas sederhana dan vs Konstitusi kaku yang hanya dapat diubah oleh mayoritas sederhana.

Berdasarkan perbedaan dua dimensi di atas, Lijphart mengklasifikasikan demokrasi modern. Menurut Arend Lijphart, model demokrasi terdiri dari dua jenis, yaitu demokrasi Westminster, atau model demokrasi mayoritas dan model demokrasi konsensus.<sup>33</sup>

- a. Model demokrasi Westminster atau model demokrasi mayoritas

Model Westminster didasarkan pada aturan mayoritas. Menurut Arend Lijphart, mayoritarianisme yang murni disebutnya sebagai model Westminster, mengambil nama dari lokasi gedung parlemen Inggris yang terletak di bagian kota London, yang disebut sebagai *City of Westminster*.<sup>34</sup> Model Westminster ini dapat dianggap sebagai solusi yang paling jelas untuk masalah tentang harapan sosial dari definisi demokrasi. Arend Lijphart berpendapat bahwa demokrasi berdasarkan prinsip mayoritarianisme lebih seimbang ketika diterapkan pada masyarakat yang bersifat homogen,

---

<sup>33</sup>Ibid.3

<sup>34</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, 4.

sedangkan demokrasi berdasarkan prinsip konsensus lebih seimbang ketika diterapkan pada masyarakat yang heterogen.<sup>35</sup>

Dalam model demokrasi mayoritarianisme Westminster atau mayoritas orang menganggap demokrasi sebagai undang-undang yang diputuskan oleh masyarakat mayoritas sebagai pemerintah yang berkuasa. Dalam demokrasi mayoritas ini, partai politik harus mendapatkan mayoritas sebagai syarat untuk membentuk pemerintahan.<sup>36</sup>

Westminster (*Majoritarian*) Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam kehidupan politik, masyarakat mayoritas yang harus memerintah. Esensi model Westminster adalah aturan mayoritarian. Model tersebut dipandang sebagai solusi yang paling jelas terhadap pengertian rakyat dalam mendefinisikan demokrasi.<sup>37</sup>

Model ini memiliki 9 ciri sebagai berikut:

- 1) Pemusatan kekuasaan eksekutif. Aturan satu partai dengan kabinet partai mayoritas. Prinsip ini mengatur bahwa kabinet memiliki kekuasaan yang kuat, pada umumnya dibentuk oleh partai dengan kursi parlemen yang mayoritas sehingga kabinet koalisi hampir tidak pernah terjadi.
- 2) Peleburan kekuasaan dan dominasi kabinet

---

<sup>35</sup>Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance In Thirty Six Countries*.4

<sup>36</sup>Hasnawi Haris, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.18

<sup>37</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*.215



- 3) Bikameralisme asimetris
- 4) Sistem dua partai
- 5) Sistem pluralisme dalam pemilu
- 6) Sistem partai berdimensi tunggal atau satu
- 7) Pemerintah yang bersatu dan terpusat
- 8) Konstitusi tak tertulis dan kedaulatan parlemen
- 9) Demokrasi representatif yang eksklusif.<sup>38</sup>

b. Model Konsensus

Model demokrasi konsensus, berarti partisipasi beberapa partai atau kelompok politik dalam mencapai kompromi dan menghormati hak-hak minoritas, yang penting dalam pengambilan keputusan legislatif. Meskipun masih dianggap sebagai demokrasi terbaik di dunia, demokrasi model Westminster masih menerima kritik yang berbeda dikarenakan sistem politik yang ada saat ini.<sup>39</sup> Artinya bahwa demokrasi konsensus merupakan jawaban terhadap ketidakmampuan dalam respon atas kekurangan demokrasi mayoritas untuk mengakomodir kelompok minoritas. Demokrasi ini berkembang atas dasar konsensus para pemangku kepentingan.

Demokrasi konsensus mengubah kemampuan pemerintah koalisi untuk mempertahankan pluralisme dalam masyarakat, partai

---

<sup>38</sup>M.A H.Asep Saeful Muhtadi, *Pembangunan Politik* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2016).52-53

<sup>39</sup>Indra Pahlevi, "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia," *politica* 5 (2014): 2.

politik, dan badan legislatif. Sebagai saluran politik bagi kelompok minoritas, partai kecil dapat memainkan peran langsung dalam pemerintahan federal.<sup>40</sup> Model konsensus dari demokrasi dapat dilihat dalam delapan elemen yang sangat jauh berbeda dengan karakteristik mayoritas dari model westminster. Berikut 8 karakteristik model konsensus:

- 1) Pembagian kekuasaan eksekutif koalisi besar
- 2) Pembagian kekuasaan, formal dan informal
- 3) *Bicameralism* yang seimbang
- 4) Sistem multi partai
- 5) Sistem Partai multidimensi
- 6) *Proportional representation*
- 7) Federalisme dan desentralisasi federasi teritorial dan non teritorial
- 8) Konstitusi tertulis dan veto minoritas.<sup>41</sup>

Melihat kedua model demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya banyak digunakan sebagai negosiasi antara partai politik.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kedua model memiliki kelemahan yang tidak sesuai dengan nilai inti dari konsep demokrasi. Misalnya, dalam model Westminster (*Majoritarian*) kritik muncul bahwa memiliki begitu banyak kekuasaan ditangan Perdana

---

<sup>40</sup>Hasnawi Haris, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.18

<sup>41</sup>Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*.232-237

<sup>42</sup>Hasnawi Haris, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.18

Menteri dan umumnya tidak terlalu merasakan pemisahan kekuasaan. Dalam model konsensus yang sama kritiknya adalah berapa lama untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, tidak ada jaminan implementasi demokrasi sebagai sistem pemerintahan akan mempengaruhi efektivitas pemerintahan.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang politik demokrasi dan teori mayoritarianisme di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi dan mayoritarianisme saling terkait namun berbeda. Demokrasi tidak hanya suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, kemudian rakyat yang terpilih memerintah, dan yang diperintah adalah rakyat sendiri, dan demokrasi juga tidak hanya tentang memenangkan suara mayoritas dalam suatu pemilihan atau tindakan, melainkan juga tentang perlindungan hak-hak minoritas dan mencapai kesepakatan bersama antar semua penduduk dalam suatu masyarakat.

Politik demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum secara bebas dan adil. Dalam politik demokrasi, mayoritas memiliki kekuatan untuk memutuskan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan Paham mayoritarianisme, adalah pandangan bahwa keputusan yang

---

<sup>43</sup>H.Asep Saeful Muhtadi, *Pembangunan Politik*.43-54

diambil oleh mayoritas selalu benar dan adil karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan. Dalam konteks politik, paham mayoritarianisme dapat diterapkan pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemilih dalam pemilihan umum.

Namun, hubungan antara politik demokrasi dan paham mayoritarianisme tidak selalu harmonis. Terkadang, keputusan-keputusan mayoritas dapat mengabaikan hak-hak minoritas. Oleh sebab itu, dalam politik demokrasi yang sehat, mayoritas harus tetap mempertimbangkan hak minoritas dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah pemilihan, keputusan mayoritas harus diambil dengan memperhatikan hak minoritas. Hal ini dapat dicapai dengan cara memastikan adanya hak suara yang sama bagi semua warga negara, menjamin kebebasan berbicara, dan mendorong dialog dan kompromi antar kelompok. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berfokus pada mayoritas, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak minoritas tetap dihormati dan dijaga.

### **C. Landasan Teologis**

Hubungan antara politik demokrasi mayoritarianisme dengan ilmu teologi tergantung pada pemahaman interpretasi individu terhadap kedua hal ini. Secara teoritis, politik demokrasi mayoritarianisme berfokus pada

pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada suara mayoritas. Dalam hal ini kekuasaan politik terpusat pada mayoritas penduduk, yang menentukan kebijakan dan tindakan pemerintah. Sementara itu, ilmu teologi berhubungan dengan keyakinan agama, dan spiritualitas. Dalam hal ini, terdapat hubungan antara politik demokrasi yang mayoritarianisme dengan ilmu teologi dalam hal penilaian moral dan etika. Seperti dibawa ini akan dijelaskan bagaimana pandangan Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) tentang demokrasi dan mayoritarianisme.

#### 1. Perjanjian Lama

Dalam perjanjian lama, bangsa Israel memang tidak mengenal adanya parlemen sebagai lembaga pembuat undang-undang oleh karena Tuhan sendiri yang membuat undang-undang yang berupa hukum taurat. Sehingga dengan demikian William Dyrnes mengatakan bahwa hukum taurat menempatkan semua orang sederajat dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan dan tidak terdapat perbedaan kelas.<sup>44</sup> Israel adalah negara teokrasi dengan bentuk kerajaan. Pemimpin yang memerintah dipilih langsung oleh Allah seperti Daud, Musa, Yerobeam dan beberapa lainnya ( 1 Taw.k 17:11-14;2 Taw. 7:17-18;1Raj.11:30-32). Para hakim yang memimpin Israel sebelum adanya kerajaan juga dipilih langsung oleh Allah. Walaupun Negara teorasi, namun bukan berarti

---

<sup>44</sup>William Dyrnes, *Tema-Tema Dalam Teologi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2004).113

bahwa aspirasi rakyat untuk memilih seorang pemimpin ditolak dalam Perjanjian Lama. Taurat bahkan memberikan ruang bagi pemilihan raja yang akan dilakukan oleh bangsa Israel ( Ulangan 17:14-15).<sup>45</sup>

Pemilihan yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel ini mempengaruhi sikap-sikap bangsa Israel tersebut dalam berlaku dalam kehidupan kelompok mereka. Dalam kitab Keluaran Bangsa Israel mengalami penindasan, dan Allah mengutus Musa untuk menjadi penyelamat bagi umat yang tertindas. Musa terpanggil bukan untuk menikmati berkat-berkat rohani untuk dirinya saja, tetapi untuk Allah dan sesama manusia.<sup>46</sup> Setelah Musa berumur 80 tahun Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan serta membawa bangsa itu pergi ke negeri perjanjian.<sup>47</sup> Panggilan Musa merupakan langkah awal bagi Allah dalam melepaskan umat-Nya dalam dari perbudakan Mesir. Tuhan bersabda kepada Musa bahwa sudah kudengar ratap dan tangis bangsaKu. Sekarang aku datang dan membebaskan mereka dan akan ku antar ke negeri yang bahagia. Hal ini membuat Musa bahagia. Sebab ia masih boleh menyaksikan bangsanya bebas dari penjajahan bangsa Mesir yang kejam itu.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>C. Hassell Bullock, *Kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2002).33

<sup>46</sup>Robert M.Paterson, *Tafsiran Kitab Keluaran*.64

<sup>47</sup>J.Oswald Sanders, *Kepemimpinan Rohani*.117

<sup>48</sup>Anne de Vries, *Cerita-Cerita Alkitab Perjanjian Lama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010).147-

Tugas yang diberikan kepada Musa tidaklah mudah, ia akan membebaskan bangsa Israel yang memiliki jumlah banyak bahkan. Hal Musa harus berhadapan dengan Firaun yang adalah raja yakni memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam pemanggilanya pada awalnya Musa memiliki pikiran kerendahan hati untuk memimpin, seperti dalam (Kel.4:10).

Kepemimpinan Musa yang tidak meninggalkan bangsa Israel yang mengalami penindasan. Meskipun dalam memimpin ke tanah perjanjian Musa tahu bahwa dia tidak akan sampai ke tanah karena Musa memiliki kesalahan sehingga Yosua dipilih Musa untuk menggantikannya. Musa merupakan seorang pemimpin yang besar dan terdidik dalam tradisi Mesir, yang di utus Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tana Mesir. Musa memiliki karakter dalam memimpin yakni dengan pemimpin yang memiliki kemampuan dan kasih untuk kepentingan rakyat, tidak mementingkan diri sendiri, taat, berani, serta memiliki visi.

Musa dalam menelaksanakan kepemimpinannya menerapkan gaya demokratis, hal ini dapat dilihat ketika ia mengangkat para orang-orang cakap dan mengangkatnya menjadi kepala atas bangsa tersebut ( Kel. 18:25).<sup>49</sup> Musa membagi tugas dan tanggung jawab kepada Imam Besar untuk menjadi Kepala bagi beberapa daerah (Kel.18:25). Dengan hal

---

<sup>49</sup>J.Oswald Sanders, *Kepemimpinan Rohani*.138

ini maka dapat menjadi pedoman bagi seorang pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawabnya bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang dilakukan bersama dengan orang lain (kerja sama) untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik.

## 2. Perjanjian Baru

Perjanjian Baru juga memberikan bukti adanya pemilihan secara demokratis yang dikombinasikan dengan pemilihan dari atas ke bawah (*top-down election*). Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Matias untuk menggantikan posisi Yudas sebagai murid Yesus adalah sebelum melalui proses usulan kandidat dari 120 orang yang hadir di suatu tempat di Yerusalem (Kis. 1:15).<sup>50</sup> Mereka mengusulkan 2 nama yang kemudian setelah berdoa dan membuang undi Terpilihlah Matias. (Kis. 1:15-26). Petrus mengusulkan agar para rasul memilih seorang rasul baru, menggantikan Posisi Yudas Iskariot, yang telah melakukan bunuh diri. Usul itu diterima oleh para rasul yang lain. Menurut Petrus, yang boleh di pilih menjadi rasul, menggantikan Yudas Iskariot itu, adalah orang yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai beliau terangkat ke sorga meninggalkan kami.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>H.v.d.Brink, *Tafsiran Alkitab Kisah Para Rasul* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008).20

<sup>51</sup>Al. Purwa Hadiwardoyo, *Intisari Kisah Para Rasul* (Yogyakarta: kanisus, 2016).7



Demikian juga dengan pemilihan 7 orang diaken untuk melakukan pelayanan meja juga melalui penyaluran aspirasi jemaat yang memilih para diaken tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh para rasul (Kis. 6:1-7).<sup>52</sup> Jumlah orang yang menerima pewartaan Injil Kristus semakin banyak. Hal itu mendorong para rasul untuk memusatkan perhatian mereka kepada tugas pewartaan tersebut.<sup>53</sup>

Kesukaran-kesukaran dalam jemaat telah timbul, karena kebutuhan-kebutuhan sebagian jemaat tidak diperhatikan. Hal ini sebagai suatu tanda kekurangan kasih. Suasana ini semakin di pertajam, karena kekurangan kasih itu rupanya hanya mengenai satu golongan tertentu saja. Para rasul sadah bahwa telah bertumbuh suatu keadaan yang salah. Mereka mengerti bahwa dalam hal ini pergu mengambil tindakan yang tegas, supaya suasana buruk tidak berkembang terus. Tetapi tidakan inividak hendak dilaksanakan di luar lingkungan jemaat. Dengan cara yang betul-betul demokratis, jemaat di panggil berkumpul. Dalam pembicaraan ini, para rasul tetap pada pendiriannya bahwa tugas mereka yang terutama adalah untuk memberitakan firman Allah. Dengan hal ini tidak berarti bahwa tugas melayani meja tidak penting artinya. tetapi sebaliknya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>H.v.d.Brink, *Tafsiran Alkitab Kisah Para Rasul*.20

<sup>53</sup>Al. Purwa Hadiwardoyo, *Intisari Kisah Para Rasul*.7

<sup>54</sup>H.v.d.Brink, *Tafsiran Alkitab Kisah Para Rasul*.96

Dalam pembicaraan di atas harus di angkat tenaga-tenaga tersendiri dalam bahasa Yunani di sebut pelayanan meja, yang di ungkapkan dengan kata diakonein. Dengan tugas untuk melayani kebutuhan rohani jemaat dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani jemaat. Penetapan jabatan baru ini adalah atas usul pihak para rasul. Pemilihan sejumlah orang laki-laki di serahkan kepada jemaat, akan tetapi para rasul memberikan garis-garis besar dan syarat, yang harus di penuhi oleh pemangku jabatan itu ( Kis. 6:3-5).<sup>55</sup>

Karena itu, mereka memilih dan mengangkat 7 diakon, yang mereka beri tugas untuk mengurus pembagian bantuan sosial untuk warga jemaat yang membutuhkannya. Cara pemilihan ke-7 diaken (orang yang melayani orang miskin) dalam Kis.14:23 di katakana bahwa tiap jemaat rasul itu menetapkan penatua, setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan kepada Tuhan. Para diakon itu adalah Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Ibid.96

<sup>56</sup>Al. Purwa Hadiwardoyo, *Intisari Kisah Para Rasul*.14